

DINAMIKA POLITIK PEDESAAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA MASIN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

Tatik Rohmawati

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unikom
Universitas Komputer Indonesia
Jalan Dipatiukur Nomor 112-116, Bandung, 40132, Indonesia

Email : tatik_msn@yahoo.co.id

Abstrak

Permasalahan yang diajukan adalah untuk menjawab bagaimana hubungan/relasi dari aktor-aktor yang terlibat dalam pemilihan Kepala Desa Masin dan bagaimana dinamika pemilihan Kepala Desa Masin ditinjau dari konflik dan kompetisi yang berlangsung selama pemilihan Kepala Desa Masin. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana peneliti berperan sebagai instrumen penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi untuk menjadi kepala desa itu berasal dari diri sendiri dan faktor lingkungan serta faktor ekonomis, politik dan status sosial. Calon Kepala Desa dalam mengorganisasikan strategi menggunakan kader-kader, kader-kader tersebut dicari dari orang-orang yang mudah bergaul dan dapat mengartikulasikan keterangan dan mempunyai kelompok kekerabatan yang banyak anggotanya. Pelaksanaan strategi persaingan dalam pemilihan kepala desa dilakukan dengan mengadakan silaturahmi, menyampaikan program-program tertentu dan menggunakan *money politics*.

Abstract

Set of problems which is submitted is to answer how relation of actors who is involved in the election of village headman Masin and how the election dynamics of village headman Masin is submitted from conflict and competition which taking place during the election of village headman Masin. This method of the research is used descriptive method, where researcher has a role as research instrument. Data collection method passed through observation, interview and study documentation. The result of this research showed that motivation to be a village headman from himself and environment and economic factor, politics and social status. The candidate of village headman in organize strategy used cadre, cadre is looked for from men or woman who are easy to associate and able to articulate an information and have kinship group who have many members. Realization strategy competition in the election of village headman is carried out by holding a good relationship, extending certain programs and used money politics.

Keywords : Pilkades, Politik Pedesaan, Dinamika Politik, Demokrasi Desa, Otonomi Asli.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Lahirnya gerakan reformasi pada tahun 1998, membawa dampak yang sangat luas dalam tata kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan yang ada. Di era Orde Baru, penyelenggaraan pemerintahan berjalan hanya semata-mata mengikuti kehendak penguasa dengan menjadikan birokrasi kekuasaan di pusat-pusat pemerintahan sebagai ujung tombak utama dengan mengabaikan berbagai potensi yang ada di masing-masing daerah. Dampak langsung dari penyelenggaraan pemerintahan tersebut adalah semakin seragam potensi dan kepentingan daerah yang ada.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka berakhirilah penyelenggaraan pemerintahan desa yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan jiwa UUD 1945, khususnya yang menyangkut hak asal usul daerah yang bersifat istimewa, sehingga perlu diganti. Adapun landasan pemikiran dari undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan rumusan tersebut, Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 mengisyaratkan dan menghendaki bahwa pemerintahan desa (berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979) diganti dengan pemerintahan desa berdasarkan adat istiadat dan asal usul daerah yang bersifat istimewa. Namun demikian penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut tetap merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kepada desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga masyarakatnya.

Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa Masin merupakan salah satu desa di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah. Di Desa Masin merupakan contoh proses pemilihan kepala desa yang berlangsung seru dalam arena perpolitikan. Hal ini dapat dilihat pada saat sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa, para Calon Kepala Desa Masin berkompetisi untuk mencari dukungan massa sebanyak-banyaknya dengan cara menjanjikan sesuatu kepada warga desanya atau dengan *me-lobby* warga Desa Masin.

Upaya dalam *me-lobby* warga Desa Masin yaitu dengan mendekati ulama-ulama, pemuda-pemudi karang taruna Desa Masin dan saudara-saudara kerabatnya. Disamping itu Calon Kepala Desa Masin menggunakan *money politics* yaitu dengan cara membagi-bagikan uang kepada warga desa setempat dengan maksud agar warga

desa mendukung calon kepala desa tersebut. Wujud *money politics* yang lain bisa berupa membangun sarana yang mendukung bagi pembangunan Desa Masin, sehingga warga Desa Masin akan memberikan suaranya kepada Calon Kepala Desa Masin.

Calon Kepala Desa Masin mendekati para ulama untuk mendapatkan dukungan agar terpilih sebagai Kepala Desa Masin, dengan cara menjalin silaturahmi, bertandang ke rumah ulama tersebut, sehingga ulama dapat menyebarkan pengaruh ulama tersebut kepada warga desa. Para ulama Desa Masin mempunyai pengaruh besar terhadap warga Desa Masin, karena dianggap sebagai panutan dan sesepuh.

Disamping itu, Calon Kepala Desa Masin dapat *me-lobby* dari pemuda-pemudi karang taruna Desa Masin dengan cara menjanjikan fasilitas-fasilitas yang mendukung perkembangan karang taruna. Karang taruna merupakan wadah organisasi pemuda-pemudi, sehingga Calon Kepala Desa dapat memperoleh dukungan dari kaum pemuda pemudi Desa Masin.

Saudara atau kerabat dekat dari Calon Kepala Desa Masin tentu saja dapat memilih Calon Kepala Desa Masin tersebut untuk dapat memenangkan suaranya, sehingga terpilih menjadi Kepala Desa Masin.

Peristiwa adanya pemilihan Kepala Desa Masin tersebut menimbulkan kompetisi atau persaingan antar Calon Kepala Desa Masin. Masing-masing Calon Kepala Desa Masin saling menyebarkan pengaruhnya kepada warga Desa Masin untuk mendapatkan dukungan sehingga warga desa akan memilihnya menjadi Kepala Desa Masin.

Upaya untuk menarik simpati dari warga Desa Masin, Calon Kepala Desa Masin akan mendekatinya dengan menjalin silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat Desa Masin seperti tokoh agama, kalangan pemuda-pemudi dan kerabat-kerabatnya. Upaya calon kepala desa tersebut dibarengi dengan janji-janji yang nantinya setelah terpilih menjadi Kepala Desa Masin, maka harus merealisasikannya.

Salah satu tantangan yang perlu diteliti adalah bagaimana dinamika politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa. Sehubungan dengan adanya fenomena tersebut, maka penulis bermaksud untuk mengkaji tentang dinamika politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa, khususnya di Desa Masin

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antar aktor yang terlibat dalam pemilihan Kepala Desa Masin ?
2. Bagaimana dinamika pemilihan Kepala Desa Masin ditinjau dari konflik dan kompetisi yang berlangsung selama pemilihan Kepala Desa Masin?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dinamika politik pedesaan dalam pemilihan Kepala Desa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memetakan pola hubungan/relasi dari aktor-aktor yang terlibat dalam pemilihan Kepala Desa Masin.
2. Untuk mengetahui dinamika pemilihan kepala desa ditinjau dari konflik dan kompetisi yang berlangsung selama pemilihan Kepala Desa Masin.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk kepentingan penyusun, yaitu untuk menambah khasanah teoritis dan pengetahuan serta sebagai tempat atau wadah untuk menerapkan teori-teori tentang dinamika politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa .
2. Untuk kepentingan ilmiah, yaitu untuk mengembangkan konsep yang bermanfaat dan membangun bagi ilmu pemerintahan, khususnya kajian politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa.
3. Untuk lembaga yang terkait, yaitu sebagai masukan yang berkaitan dengan berbagai persoalan tentang dinamika politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Pembagian daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul yang bersifat istimewa. Negara kesatuan RI menghormati kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa tersebut dengan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal usul daerah tersebut.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sutardjo Kartohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “Desa” mengemukakan Pengertian tentang kewenangan sesuatu daerah hukum yang dilukiskan dengan istilah asing “otonomi”, dalam bahasa Indonesia; hak untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam hukum adat sebenarnya tidak dikenal oleh bangsa Indonesia”

Pengertian tentang otonomi desa adalah ciptaan bangsa Belanda waktu mereka masih memegang kekuasaan di sini, selanjutnya dikatakan pula, bahwa hak otonomi atau hak mengatur dan mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukum yang diatur dalam hukum adat adalah kewenangan dan kewajiban tiada hanya yang bersangkutan dengan kepentingan keduniawian, akan tetapi juga yang bersangkutan dengan kepentingan kerohanian. Tidak hanya yang berkenaan dengan pemerintah (kenegaraan) akan tetapi juga yang berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorang. Teranglah bahwa isi otonomi desa menurut hukum adat adalah sangat luas (Kartohadikoesoemo, 1973: 12)

Dengan demikian, otonomi yang dimiliki desa adalah otonomi asli, yaitu otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat, sehingga dalam kenyataannya pasti akan timbul berbagai keanekaragaman, baik dari segi nama, susunan pemerintahan, maupun bentuk-bentukan geografisnya. Tegasnya, terdapat keadaan-keadaan khusus yang berbeda satu dengan yang lainnya. Keadaan tersebut sebenarnya prinsip-prinsip “Kebhinekaan” itu ada dan berkembang secara nyata dalam masyarakat, sehingga secara riil hak-hak, asal-usul, istiadat ini harus dihormati sebagai modal pembangunan desa. Hal ini terjadi, apabila semboyan demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of, by, and for the people*), itu dihargai dan ditegakkan. Demokrasi yang terjadi di desa adalah *grass-roots democracy*. Rakyat merupakan kekuatan-kekuatan yang berasal dari bawah yang akan menjadi pembaharuan (*autonomous energies*) untuk menuju suatu keadaan atau kondisi yang lebih baik.

Keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat desa, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan desa. Secara prinsip, pelaksanaan pemilihan kepala desa ditujukan guna mewujudkan kedaulatan rakyat di desa yang bersangkutan. Keadaan tersebut menimbulkan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa tidak saja di tangan kepala desa, BPD dan aparat pelaksanaanya, tetapi juga di tangan masyarakat desa tersebut.

Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat di atas adalah adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam memilih kepala desa.

Disamping itu partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi masyarakat didasarkan pada pertimbangan :

Bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masyarakat berikutnya (Budiardjo, 1982: 2)

Demokrasi, diukur dengan bekerjanya tiga nilai penting yaitu kontestasi (kompetisi), liberalisasi dan partisipasi (Dahl, 1971: 6-7). Ketiganya disandarkan pada kebebasan individu, khususnya kebebasan untuk (*freedom for*) berkompertisi memperebutkan jabatan-jabatan publik baik eksekutif maupun lembaga perwakilan (legislatif) melalui proses pemilihan. Setiap orang bebas berpartisipasi dalam pemilihan umum, menggunakan hak suaranya secara bebas tanpa tekanan, ancaman atau mobilisasi. Setiap orang harus bebas untuk berbicara, berkumpul, berserikat, memperoleh informasi dari pers yang bebas dan lain-lain.

Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya “Masalah Kenegaraan” mengatakan bahwa demokrasi itu mempunyai nilai-nilai khusus.

Nilai pertama adalah menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela. Nilai kedua adalah yang menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah. Nilai ketiga adalah pergantian penguasa secara teratur. Nilai keempat adalah penggunaan paksaan sesedikit mungkin. Nilai kelima adalah keanekaragaman. Nilai keenam adalah menegakkan keadilan. Nilai ketujuh adalah suatu nilai yang sering dikemukakan atas nama demokrasi yaitu sistem demokrasilah yang paling baik dalam memajukan ilmu pengetahuan. Nilai kedelapan terdiri dari kebebasan-kebebasan yang terdapat dalam demokrasi. Nilai yang kesembilan akhirnya , nilai yang dapat diberikan kepada demokrasi karena kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam sistem-sistem lain. (Budiardjo, 1982: 165-191)

Demokrasi desa dalam catatan sejarah yang membuktikan bahwa pada masa lalu desa-desa di Indonesia telah dikelola dengan menggunakan sebuah sistem nilai tradisional yang prinsip dasarnya memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi modern. Bisa dikatakan demikian karena secara politik masyarakat desa mendasarkan dirinya kepada kedaulatan rakyat, hal ini bisa terlihat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh masyarakat desa yang bersifat langsung dimana calon-calonnya mereka ajukan sendiri kemudian kegiatan musyawarah dan rembung desa yang berlangsung secara intensif. Bukti empiris ini bahkan menunjukkan bahwa prinsip demokrasi yang dijalankan di desa memiliki tingkat kualitas yang lebih baik dibandingkan jika dilihat dari pemahaman konsep demokrasi populer yang sangat mekanistik dan prosedural.

Demokrasi desa menurut Ina E. Slamet merupakan demokrasi asli dari suatu masyarakat yang belum mengalami stratafikasi sosial (dalam Suhartono, 2001: 26)

Demokrasi desa sebagaimana dikatakan oleh Hatta mengandung tiga ciri, yakni: rapat (tempat rakyat bermusyawarah dan bermufakat), hak rakyat untuk mengadakan protes, dan cita-cita tolong menolong (dalam Suhartono, 2001:26)

Menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya “Pemerintahan Desa/Marga berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999” tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa :
Kepala desa dipilih langsung oleh Penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan. (Widjaja, 2002: 48)

H.A.W Widjaja dalam bukunya tentang “Pemerintahan Desa/Marga” mengatakan bahwa :
Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak . Calon kepala desa yang terpilih tersebut ditetapkan dengan keputusan BPD/BPM berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih. (Widjaja, 2002: 48) Figur seorang calon kepala desa harus benar-benar sesuai dengan karakteristik pemimpin yang baik, dimana calon kepala desa tersebut harus berani berkorban untuk kepentingan warga desanya.

Seseorang yang akan menjadi kepala desa harus mempunyai motivasi atau keinginan yang kuat agar cita-citanya itu berjalan dengan lancar. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Kana dalam “jurnal Politik Lokal dan Sosial-Humaniora” bahwa : “Motivasi menjadi calon kepala desa itu berasal dari luar dan dari diri calon kepala desa tersebut” (Kana, 2001: 17)

Seorang kepala desa akan melakukan hal-hal yang mendukung dalam perolehan suara, oleh karena itu seorang calon kepala desa harus bisa merekrut kader-kadernya untuk mengorganisasikan strateginya, agar terpilih menjadi kepala desa. Ini sesuai dengan yang dikatakan Kana bahwa : “Rekrutmen kader pendukung untuk mengorganisasikan strategi dalam pemilihan kepala desa yaitu menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemuda-pemudi karang taruna” (Kana, 2001: 7)

Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa, para calon kepala desa sudah mempersiapkan strategi untuk memenangkan pemilihan tersebut. Hal ini seperti yang terdapat dalam jurnal “Politik Lokal dan Sosial-Humaniora” oleh Kana bahwa :
Pelaksanaan strategi persaingan dalam pemilihan kepala desa dilakukan dengan menggunakan uang (*money politics*), dengan menyelenggarakan *iztihad*/doa bersama, *dudah ngamal* artinya mengungkapkan hal-hal baik yang pernah dibuat oleh calon kepala desa di masa lalu kepada masyarakat, dan juga dengan mengadakan silaturahmi yaitu kunjungan ke rumah-rumah penduduk (Kana, 2001: 9, 15)

3. Objek dan Metode Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Masin yang melaksanakan pemilihan kepala desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif* yaitu hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Maksudnya Penulis hanya sekedar menjelaskan situasi atau peristiwa, tidak mencari hubungan sebab akibat, membuat uji hipotesis atau membuat prediksi.

Pada hakekatnya, penelitian *deskriptif* mempunyai tujuan seperti yang dikemukakan oleh Soehartono bahwa : Metode penelitian *deskriptif* bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih (Soehartono, 2002:35)

Menurut Nawawi, penelitian *deskriptif* mempunyai ciri-ciri pokok. Ciri-ciri pokok dari metode *deskriptif* adalah sebagai berikut :

- 1) Memusatkan perhatian-perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual
- 2) Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang *adequat*. (Nawawi, 2001: 63-64)

3.1. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui :

1. Studi pustaka, yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku, majalah dan surat kabar yang berhubungan dengan dinamika politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa.
2. Studi lapangan, yaitu dengan mengamati dan terjun langsung ke Desa Masin untuk mengetahui tentang dinamika politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :
 - a. *Observasi*, yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung permasalahan yang ada di Desa Masin tentang dinamika politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa
 - b. *Wawancara*, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti/pewawancara kepada warga Desa Masin yang dewasa, anggota BPD dan aparat desa, dan jawaban-jawaban tersebut dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*). Ini disebut data primer yaitu keseluruhan data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden serta dari hasil pengamatan yang secara langsung.
 - c. *Studi dokumentasi*, yaitu tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian dalam hal ini warga Desa Masin, anggota BPD dan aparat desa. Studi dokumentasi disini berupa buku harian, laporan, dan notulen rapat.

3.2. Unit Analisis

Unit analisis menunjukkan siapa atau apa yang mempunyai karakteristik yang akan diteliti (Soehartono, 2002: 29). Unit analisis dalam penelitian ini terdiri dari seluruh warga Desa Masin yang dewasa beserta aparat desa. Dari unit analisis tersebut diambil sebuah sampel. Tehnik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling*, dimana peneliti mengambil orang-orang yang terpilih betul sesuai dengan tujuan penelitian. Orang-orang yang dijadikan informan diantaranya :

1. Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda
2. Pemimpin Organisasi Kemasyarakatan
3. Warga masyarakat Desa Masin
4. Kepala Desa Masin.
5. Perangkat Desa
6. Pengurus LKMD
7. Pengurus BPD.
8. Kepala Dusun

3.3. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka analisis yang digunakan adalah analisis *deskriptif kualitatif*. Secara operasional, tehnik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model tehnik analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman (1992: 15-20).

Pertama, reduksi data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, klasifikasi data kasar dari hasil penggunaan tehnik dan alat pengumpulan data di lapangan. Reduksi data sudah dilakukan semenjak pengumpulan data. Reduksi dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan menelusuri tema yang tersebar. Setiap data yang dipilih disilang melalui komentar informan yang berbeda untuk menggali informasi dalam wawancara dan observasi. Informasi yang berasal dari tokoh-tokoh dalam struktur keorganisasian desa disilangkan dengan informasi yang diperoleh dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh ulama.

Kedua, penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya terpencar dan terpisah menurut sumber informasi dan pada saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian, data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan yang antara lain terkait dengan dinamika politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa.

Ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, interpretasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal-hal yang khusus (spesifik) sampai kepada rumusan simpulan yang sifatnya umum (general).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hubungan Antar Aktor Yang Terlibat Dalam Pemilihan Kepala Desa Masin

Calon Kepala Desa Masin harus bisa menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan basis massa, sehingga basis massa akan mendukung calon kepala desa tersebut yang akhirnya akan terpilih menjadi Kepala Desa Masin. Hubungan yang terjalin antara aktor-aktor yang terlibat dalam pemilihan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari pengaruh jaringan sosial yang selama ini berlangsung di Desa Masin.

Hubungan sosial yang dijalin antara seseorang dengan sejumlah warga masyarakat lainnya mempunyai tingkat keamatan dan keseringan yang bervariasi. Dengan demikian, ada sejumlah individu yang memiliki hubungan-hubungan sosial yang erat dan kerap dengan seseorang. Ada pula sejumlah orang lainnya yang jarang mengadakan interaksi sosial dengan orang tertentu, sehingga hubungan sosialnya tidak erat. Selain itu, terdapat pula sejumlah orang yang tidak mempunyai hubungan sosial dengan individu-individu tertentu.

Menurut Sartono Kartodirdjo, ciri khas dari sejumlah komunitas kecil seperti desa adalah adanya ikatan komunal yang cukup kuat. Kekuatan komunal itu terutama terwujud dalam suatu kelompok sosial yang berupa kehidupan bertetangga dekat, serta dalam kegiatan-kegiatan yang berdasarkan etos paguyuban. Kegiatan itu misalnya berupa sumbangan, *slametan*, *jagongan* (pesta kenduri) dan sebagainya (Kartodirdjo, 1987: 82).

Pada dasarnya hubungan yang terjadi antara Calon Kepala Desa Masin dengan basis massa itu karena adanya hubungan kekerabatan, dimana adanya hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah. Menurut Ferdinand Tönnies hubungan kekerabatan ini berupa paguyuban (*gemeinschaft*) dan patembayan (*gesellschaft*) (Dalam Soekanto, 1999: 144).

Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis. Bentuk paguyuban terutama akan dapat dijumpai di dalam keluarga, kelompok kerabatan, rukun tetangga dan lain sebagainya.

Sebaliknya, patembayan (*gesellschaft*) merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam fikiran belaka (*imaginary*) serta strukturnya bersifat mekanis sebagaimana dapat diumpamakan dengan sebuah mesin. Bentuk *gesellschaft* terutama terdapat di dalam hubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik, misalnya ikatan antara pedagang, organisasi dalam suatu pabrik atau industri dan lain sebagainya.

Menurut Tonnies, paguyuban (*gemeinschaft*) mempunyai beberapa ciri pokok, yaitu :

1. *intimate*, yakni hubungan menyeluruh yang mesra
2. *private*, yakni hubungan yang bersifat pribadi, yaitu khusus untuk beberapa orang saja
3. *exclusive*, yakni hubungan tersebut hanyalah untuk “kita” saja dan tidak untuk orang-orang lain di luar “kita”.

Di dalam *gemeinschaft* atau paguyuban terdapat suatu kemauan bersama (*common will*), ada suatu pengertian (*understanding*) serta juga kaidah-kaidah yang timbul dengan sendirinya dari kelompok tersebut.

Menurut Tonnies, di dalam setiap masyarakat selalu dijumpai salah satu diantara tiga tipe paguyuban, yaitu:

1. paguyuban karena ikatan darah (*gemeinschaft by blood*), yaitu *gemeinschaft* atau paguyuban yang merupakan ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan, contoh: keluarga, kelompok kekerabatan.
2. paguyuban karena tempat (*gemeinschaft of place*), yaitu suatu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal, sehingga dapat saling tolong-menolong, contoh: Rukun Tetangga, Rukun Warga, arisan.
3. paguyuban karena jiwa-pikiran (*gemeinschaft of mind*), yang merupakan suatu *gemeinschaft* yang terdiri dari orang-orang yang walaupun tak mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggalnya tidak berdekatan, akan tetapi mereka mempunyai jiwa dan fikiran yang sama. Paguyuban semacam ini biasanya ikatannya tidaklah sekuat paguyuban karena darah atau keturunan.

Hubungan kekerabatan yang terjadi di Desa Masin ini dapat dipengaruhi atas dasar :

1) Persahabatan

Persahabatan di sini diartikan sebagai teman sejawat, sepermainan dan semasa bertemu di pendidikan sekolah. Seorang teman yang dahulu pernah akrab dan dekat tentunya akan mendukung sahabatnya yang menjadi calon kepala desa. Secara otomatis tidak harus dipengaruhi oleh calon kepala desa tersebut. Teman atau sahabat itu akan mendukungnya untuk terpilih menjadi Kepala Desa Masin, karena menurut hasil wawancara teman tersebut mengetahui sifat, sikap dan karakter-karakter sesungguhnya dari calon kepala desa. Di sini ditegaskan sesuai dengan sumber yang dipercaya bahwa teman atau sahabat yang mendukung calon kepala desa tersebut tidak memihak kepada calon kepala desa lain, sehingga hubungan politik yang tentang “kawan bisa jadi lawan dan lawan bisa jadi kawan” tidak berlaku walaupun tergantung dari kepentingannya. Pada prakteknya seorang calon kepala desa atau kadernya tidak akan mendatangi anggota masyarakat yang sudah menjadi kader calon kepala desa lainnya. Namun dalam upaya meraih dukungan suara yang lebih besar, seorang calon kepala desa atau kadernya akan mendatangi anggota masyarakat yang berpotensi dalam memberikan suara.

2) Persaudaraan

Persaudaraan di sini diartikan karena adanya hubungan famili baik famili jauh maupun dekat, dimana calon kepala desa akan mendekati saudara-saudaranya dengan bertandang ke rumah/silaturrehmi untuk mendukung calon kepala desa tersebut, sehingga terpilih menjadi Kepala Desa Masin. Sebagai wujud kepedulian dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan, maka secara otomatis akan mendukung saudaranya untuk terpilih menjadi Kepala Desa Masin.

3) Ketetanggaan (lokalitas)

Secara geografis, wilayah Desa Masin terbagi ke dalam dua dusun yang dipimpin oleh dua kepala dusun. Seluruh penduduk Desa Masin dikelompokkan lagi ke dalam 4 buah Rukun Warga (RW) dan 9 Rukun Tetangga (RT). setiap wilayah RT dipimpin oleh seorang ketua RT. Seorang ketua RT dapat dikatakan merupakan “pejabat” tingkat terbawah dari pemerintahan desa, yang berhubungan langsung dengan rakyat

Pada umumnya seorang RT adalah orang yang dipandang menonjol kebaktiannya kepada masyarakat setempat. Ia biasanya seorang guru atau keturunan pemuka daerah setempat. Jabatan ketua RW biasanya juga dipegang oleh seorang guru.

Dalam kesatuan RT inilah suasana hidup bertetangga sangat terasa. Sehari-hari mau tidak mau akan sering bertemu, bertatap muka dan bertegur sapa secara langsung. Sebagai akibatnya setiap hari berbagai informasi tersebar dari mulut ke mulut dengan cepat. Dalam suasana kehidupan bertetangga semacam inilah segala sifat, sikap dan karakter-karakter pribadi akan tampak dan terasa dalam pertemuan-pertemuan atau kontak-kontak yang terjadi antar warga. Misalnya dalam kegiatan saling berkunjung (bertamu), *sambat sinambat* (saling meminta pertolongan yaitu suatu cara meminta bantuan yang dilakukan menurut tata cara dan sopan santun tertentu, yakni dengan cara mendatangi seorang tetangga serta menyatakan keinginan untuk memohon bantuan), *jagong manten* (resepsi pernikahan), *mitoni* (upacara tujuh bulan kandungan untuk anak pertama, biasanya dengan membuat makanan yang disebut *ngrujak*/makanan bermacam-macam buah yang dicampur dengan bumbu dan ada kuahnya), *tetulang layat* (tolong menolong dalam peristiwa kematian), arisan dan lain-lainnya. Hal-hal seperti ini dapat berlangsung karena suatu rumah tangga di Jawa terutama harus menjalin suatu hubungan yang baik dengan para tetangganya.

Seorang ketua RT pada umumnya mengetahui dan memahami secara mendalam keadaan dari setiap warga RT-nya. Hal itu dapat terjadi karena ia sering memimpin pertemuan-pertemuan, diundang warganya untuk memberikan sambutan pada suatu acara, atau menyelesaikan pertikaian-pertikaian yang tidak jarang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena seorang ketua RT atau ketua RW biasanya secara ekonomis cukup mampu, maka tidak jarang banyak warga di sekitarnya bertamu ke rumah mereka.

Calon kepala desa akan berusaha menjalin hubungan yang baik dengan ketua RT maupun ketua RW, karena dari ketua RT dan ketua RW inilah warga desa akan menurut. Di samping itu, tetangga-tetangga dari calon kepala desa tertentu juga akan memberikan dukungan kepada calon kepala desa tersebut dengan alasan dapat mempermudah memberikan pelayanan dan juga sudah mengetahui segala sifat, sikap dan karakter-karakter pribadinya melalui kehidupan sehari-hari.

4.1.1 Hubungan Calon Kepala Desa Sugianto Dengan Basis Massa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Sugianto, Calon Kepala Desa Masin menjalin hubungan dengan basis massanya yaitu atas dasar hubungan pertemanan dan ketetanggaan. Sugianto merupakan warga Desa Masin, dimana setiap sore mengikuti olahraga sepak bola, oleh karena itu banyak teman-teman dari kelompok pemuda khususnya yang bermain sepakbola langsung mendukung Sugianto untuk mencalonkan sebagai Calon Kepala Desa Masin. Sementara itu, kelompok sepermainan sepakbola ini akan berusaha semaksimal mungkin supaya Sugianto terpilih untuk menjadi Kepala Desa Masin. Di samping itu, dukungannya yang mayoritas berasal dari Dusun Masin Timur, karena faktor simpatik atas dasar pendidikannya yang sarjana dan di Dusun Masin Timur baru pertama kali ada yang mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Desa Masin.

Selain hubungan basis massanya atas dasar hubungan pertemanan, calon kepala desa, Sugianto ini menjalin hubungan dengan basis massanya karena faktor ketetanggaan, dimana warga Desa Masin Timur ini mendukung sepenuhnya kepada calon kepala desa Sugianto agar terpilih menjadi Kepala Desa Masin yang pertama kali di Dusun Masin Timur.

4.1.2 Hubungan Calon Kepala Desa Asmilin Dengan Basis Massa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Asmilin, Calon Kepala Desa Masin lainnya yang paling muda menjalin hubungan dengan basisnya adalah atas dasar persaudaraan, baik saudara dekat maupun saudara jauh. Saudara-saudaranya akan memberikan dukungan supaya terpilih menjadi Kepala Desa Masin. Dengan adanya saudara yang terpilih menjadi kepala desa maka akan memperoleh kemudahan-kemudahan. Semua saudara Calon Kepala Desa Asmilin mendukungnya, hal ini dapat dilihat dari salah satu kakaknya yang tinggal di dusun lain menjadi kader dan berusaha untuk mencari dukungan di dusun tersebut.

Di samping itu, ada juga hubungan calon kepala desa Asmilin dengan basis massanya berdasarkan hubungan pertemanan yaitu teman sewaktu menerima pendidikan di sekolah Madrasah Tsanawiyah. Calon Kepala Desa Masin tersebut , menjadikan temannya sebagai kader untuk mencari dukungan sebanyak-banyaknya dari warga Desa Masin.

4.1.3 Hubungan Calon Kepala Desa Masrur Dengan Basis Massa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Calon Kepala Desa Masin yang terakhir yaitu Masrur, hubungan dengan basis massa yang dijalankan oleh Masrur tidak jauh berbeda dengan Calon Kepala Desa Masin, Asmilin. Masrur menjalin hubungan kerjasama dengan basis massa yaitu berdasarkan atas hubungan persaudaraan. Warga Desa Masin yang masih saudara dengan Calon Kepala Desa Masrur, baik saudara dekat maupun saudara jauh tentunya akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Calon Kepala Desa Masrur supaya terpilih lagi menjadi Kepala Desa Masin.

Di samping itu, dukungan dari basis massa yang diberikan kepada Calon Kepala Desa Masrur atas dasar rasa simpatik terhadap kepemimpinan sebelumnya, dimana Masrur dalam memimpin Desa Masin sudah lumayan berhasil dan tidak ada kasus-kasus yang menjatuhkan martabat Desa Masin.

4.2 Dinamika Pemilihan Kepala Desa Masin Ditinjau dari Konflik dan Kompetisi yang berlangsung selama Pemilihan Kepala Desa Masin

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Masin pada tahun 1999 melibatkan tiga Calon Kepala Desa Masin yaitu Sugianto, Masrur dan Asmilin. Sugianto yang mempunyai basis massa di Dusun Masin Timur, sementara Dusun Masin Tengah terbagi dua basis yaitu basis massa Asmilin dan basis massa Masrur. Ketiganya berkompetisi untuk menjadi Kepala Desa Masin dengan mencari dukungan dari warga Desa Masin sebanyak-banyaknya.

4.2.1 Strategi Yang digunakan Sugianto Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Dilihat dari motivasi untuk menjadi Calon Kepala Desa Masin, Sugianto semula seorang sarjana dalam bidang pembangunan adalah seorang tokoh yang cukup disegani di Dusun Masin Timur, tetapi belum cukup dikenal oleh warga Desa Masin secara keseluruhan khususnya di Dusun Masin Tengah. Ketokohan Sugianto ini tinggi, karena hanya sejumlah orang tertentu saja yang berkomunikasi dengannya, maksudnya Sugianto ini berasal dari keluarga yang cukup disegani oleh warga desa di dusunnya, dan karena Sugianto ini dari dahulu mengenyam pendidikan di luar daerah, maka orang-orang sekitar sangat menghormatinya atas hasil dari pendidikannya. Selain itu juga, Sugianto sangat termotivasi untuk menjadi Kepala Desa Masin, karena di Dusun Masin Timur dari dahulu adanya pemilihan Kepala Desa Masin belum pernah ada yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Masin. Sebagian kaum pemuda, beberapa tokoh agama juga mendukung Sugianto untuk menjadi Kepala Desa Masin. Di samping itu, secara pribadi Sugianto termotivasi untuk menjadi Kepala Desa Masin, karena faktor ekonomi yaitu kepala desa yang terpilih akan mendapatkan *bengkok* (sawah yang setiap tahunnya bisa dipanen atau disewakan)

yang lumayan besar, walaupun Sugianto di rumahnya itu mempunyai peternakan ayam.

Calon Kepala Desa Masin, Sugianto mencari pendukung yang akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mencari calon pemilih dengan mula-mula mendekati tokoh-tokoh masyarakat di Desa Masin untuk mendengarkan pertimbangan mereka tentang niatnya mencalonkan diri. Tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh yang dianggap lebih berpengaruh dari dirinya. Dari respon mereka Calon Kepala Desa Sugianto dapat menilai apakah ia akan didukung atau tidak, atau bahkan ditentang. Hal itu juga dilakukan untuk memenuhi tata krama di masyarakat desa, yaitu memohon perkenan dan izin dari pemimpin di masyarakat sebelum suatu kegiatan yang mengenai banyak warga di desa diselenggarakan. Dengan cara itulah antara lain Calon Kepala Desa Masin, Sugianto memperoleh kadernya, disamping dari temannya.

Di tiap dusun dibentuk kelompok yang disebut kelompok basis, yang terdiri dari sejumlah kader. Minimal jumlah anggota kader itu satu orang di tiap KK di dusun. Di dusun yang jumlah pendukungnya dianggap besar (dominan/mayoritas) jumlah kader basis ditetapkan seperlunya saja, sementara di dusun yang jumlah pendukungnya dinilai kecil (minoritas) diupayakan agar jumlah kader sebanyak jumlah KK pendukung di dusun yang bersangkutan. Kader-kader pendukung di dusun dengan jumlah mayoritas calon pemilih bertugas untuk memelihara dukungan yang sudah ada di kalangan calon pemilih dan mencegah berperannya pengaruh saingan dari kegiatan kader-kader pendukung calon kepala desa lawan. Sementara di dusun dengan minoritas calon pemilih, kader-kader pendukung Calon Kepala Desa Masin Sugianto khususnya bekerja untuk mempengaruhi warga pendukung calon kepala desa lawan agar beralih mendukung Sugianto. Dengan cara itu masyarakat pemilih di dusun dipecah dukungannya.

Proses pencarian kader pendukung yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa (cakades) Sugianto, misalnya dijalankan sebagai berikut. Cakades Sugianto merencanakan penetapan kader pendukungnya itu jauh sebelum hari pencoblosan. Pencarian itu menyusul minta pertimbangan dan mohon restu dari tokoh-tokoh masyarakat di desa.

Dukungan juga berhasil diperoleh Sugianto dari kelompok pemuda. Alasan yang melandasi dukungan kelompok ini kepada Calon Kepala Desa Sugianto antara lain karena calon kepala desa Sugianto adalah anggota kelompok sepakbola Desa Masin dan menjanjikan kalau terpilih menjadi kepala desa maka akan membangun lapangan sepak bola.

Penggunaan uang (*money politics*) juga dilakukan oleh Calon Kepala Desa Sugianto yaitu kader (pendukungnya) yang membagi-bagikan uang kepada warga Desa Masin untuk mendukung Calon Kepala Desa Sugianto. Menurut hasil wawancara dengan salah seorang warga Desa Masin bahwa besar uang yang diberikan kepada warga desa adalah Rp. 3000,-/orang.

4.2.2 Strategi Yang Digunakan Masrur Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Masrur, Calon Kepala Desa Masin lainnya, terdorong untuk mencalonkan diri terutama karena sebelumnya sudah menjadi Kepala Desa Masin. Secara otomatis pengalaman dan pertimbangannya lebih banyak. Pendorong utama pencalonan Masrur adalah banyaknya warga Desa Masin dan familinya yang mendukung, karena melihat kepemimpinan sebelumnya sudah lumayan tidak ada kasus sesuatu. Hal lain yang juga melatarbelakangi dukungan kuat dari salah satu familinya mendorong Masrur untuk mencalonkan diri adalah dukungan keuangan.

Bagi calon kepala desa yang berasal dari mantan lurah, seperti Masrur, maka kader pendukungnya datang dari aparat-aparat desa selama masa jabatan menjadi Kepala Desa Masin. Di samping dari aparat-aparat lurah, kader-kader itu juga sebagian adalah tokoh-tokoh masyarakat desa. Strategi persaingan justru dirancang oleh mereka.

Pelaksanaan strategi persaingan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa, Masrur menyelenggarakan *istighosah* (doa bersama). Di dusun, terutama di dusun dengan jumlah minoritas calon pemilih, para kader berusaha memecah/merebut calon pemilih calon kepala desa lawan. Inilah yang disebut upaya “memecah daerah”, yang dilakukan antara lain dengan menunjukkan keunggulan-keunggulan calon kepala desa sendiri dan mencegah upaya kader calon kepala desa lawan memelihara dukungan dari calon pemilihnya.

Strategi persaingan yang dilakukan oleh kader calon kepala desa, Masrur adalah dengan melakukan *dudah ngamal*, artinya mengungkapkan hal-hal yang baik yang pernah dibuat calon kepala desa semasa menjabat sebagai Kepala Desa Masin sebelumnya. Cara lain juga diterapkan misalnya membangun hubungan dengan warga Desa Masin dengan cara silaturahmi. Calon kepala desa menyediakan waktu dan rumahnya untuk menjamu tamu yang berkunjung ke tempat tinggalnya. Memang efektivitasnya kecil, karena silaturahmi itu seringkali dimanfaatkan oleh kaum muda untuk mengunjungi rumah seorang calon kepala desa lalu ke rumah calon kepala desa lainnya untuk menikmati hidangan dan acara hiburan/lagu-lagu yang diperdengarkan oleh penyelenggara silaturahmi.

4.2.3 Strategi Yang Digunakan Asmilin Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Sementara itu, calon yang terakhir yaitu Asmilin. Asmilin adalah seorang calon kepala Desa Masin yang paling muda dibanding dengan calon yang lainnya. Asmilin termotivasi untuk menjadi Kepala Desa Masin karena dorongan dari orang tuanya dan dukungan dari familinya serta sebagian warga Desa Masin. Di samping itu, Asmilin termotivasi karena status sosial maksudnya dengan menjadi Kepala Desa Masin maka secara otomatis akan dihormati dan disegani oleh warga Desa Masin.

Calon Kepala Desa Asmilin, dalam merekrut kader pendukung untuk pengorganisasian strategi dalam pemilihan Kepala Desa Masin yaitu dengan mengadakan kunjungan/silaturrehmi ke tokoh-tokoh masyarakat untuk meminta restu, termasuk ke tokoh-tokoh masyarakat yang oleh calon kepala desa yang bersangkutan telah diketahui tidak akan mendukung (pendukung calon kepala desa lawan) dan silaturrehmi (bertemu) untuk *tilik sedulur* (mengunjungi saudara). Pada saat seperti *tilik sedulur* itulah janji-janji calon kepala desa disampaikan. Misalkan bila terpilih menjadi Kepala Desa Masin pembangunan jalan-jalan dusun akan direalisasikan. Pemilihan kader dari pendukung Calon Kepala Desa Masin, Asmilin adalah anggota-anggota kerabat dan orang-orang yang paling dipercaya ditambah dengan orang-orang yang berpengaruh atau disegani dari tiap dusun.

Money politics merupakan tindakan membagi-bagikan uang (baik milik pribadi maupun bantuan dari orang lain) untuk membeli suara atau untuk mendapatkan keuntungan politis (*political gain*), artinya tindakan *money politics* itu dilakukan secara sadar oleh pelaku (Ismawan, 1999: 5)

Praktik *money politics* adalah hal yang lumrah dalam pelaksanaan strategi persaingan antar para calon kepala desa yang bertarung dalam pemilihan kepala desa. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan dianggap suatu kewajaran dalam pemilihan kepala desa, kalau calon kepala desa tidak membagikan uang kepada masyarakat untuk mencari dukungan maka tidaklah menguatkan calon kepala desa tersebut. Dari ketiga calon kepala desa, semuanya menggunakan praktik *money politics*. Praktik *money politics* tersebut dilakukan baik dari calon kepala desa maupun pendukung (kader). Mayoritas besar uang yang dibagikan kepada warga desa adalah Rp.3000,-/orang. Pembagian uang tersebut dilakukan pada malam menjelang hari pencoblosan.

Pada proses demokrasi level akar rumput (*grassroot*) ini praktik *money politics* tumbuh subur. Karena dianggap suatu kewajaran, masyarakat tidak lagi peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya, karena tidak merasa bahwa *money politics* secara normatif harus di jauhi. Segalanya berjalan dengan wajar. Kendati jelas terjadi *money politics*, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes.

Di sini kita bisa melihat betapa *money politics* telah mendarah daging di masyarakat pada tingkat akar rumput (*grassroot*) sampai tingkat elit. Perbedaannya,

pada tingkat akar rumput, praktik tersebut lebih transparan dan tidak menjadi persoalan yang sensitif. Sedangkan pada tingkat yang lebih tinggi, praktik *money politics* lebih tertutup dan menjadi hal yang sangat sensitif. Kecuali masyarakat yang telah terbiasa dengan praktik *money politics* sehingga daya kritis mereka cenderung berkurang.

Praktik *money politics* ini sebenarnya melanggar nilai-nilai demokrasi khususnya nilai keadilan, karena calon kepala desa yang murni tidak menggunakan *money politics* akan sedikit dalam memperoleh dukungan. Di samping itu, praktik *money politics* melanggar aturan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Hal ini dapat terlihat adanya penggunaan paksaan kepada warga desa untuk memilih calon kepala desa tertentu untuk melaksanakan *money politics* tersebut.

Uang dalam pemilihan kepala desa disumbangkan untuk biaya perbaikan jalan, membeli alat olahraga, dan sebagainya. Pemberian sumbangan dalam rangka kampanye semacam itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa calon kepala desa memberikan perhatian dan bersedia berbuat untuk kepentingan publik (kelompok pemuda, penduduk desa, dan seterusnya). Di kalangan masyarakat Desa Masin cara itu mempunyai pengaruhnya kepada pertimbangan warga desa tentang siapa yang akan dipilihnya. Kecuali yang sudah jelas ada hubungan kekerabatan dengan calon kepala desa, mereka akan menerima uang tersebut, tetapi dalam pencoblosan berbeda.

Menurut survei di lapangan bahwa calon kepala desa yang tidak menggunakan uang (tidak membagi-bagikan uang kepada calon pemilih pendukungnya) pasti tidak bakal terpilih, sedang calon kepala desa yang mempraktikkan *money politics* belum tentu terpilih. Artinya mempraktikkan *money politics* masih mempunyai peluang untuk terpilih.

Dalam permainan politik uang, seorang calon kepala desa beserta tim suksesnya harus menguasai benar kondisi di lapangan. Pertimbangan hati-hati ini dilakukan oleh para calon agar uang yang tersedia diberikan kepada orang yang tepat sarannya. Kalau penggunaan uang tidak hati-hati bukan hanya salah sasaran berakibat uang hilang percuma, tetapi sangat beresiko apabila informasi jatuh kepada mereka yang tidak dapat dipercaya.

Selain itu, ternyata pemberian uang tidak pula selalu dilakukan oleh para calon kepala desa. Pemberian uang dapat dilakukan melalui perantara orang lain termasuk teman akrab, keluarga, hubungan bisnis dan seterusnya. Berikut adalah akan dibahas sistem pemberian uang bagi Calon Kepala Desa Masin yang terlibat dengan politik uang.

1) Melalui Tim Sukses Calon Kepala Desa

Para bakal calon kepala desa dikelilingi oleh orang-orang yang berasal dari latar belakang berbeda. Ada yang menguasai bidang administrasi yang bertanggung jawab terhadap berbagai keperluan administrasi sang bakal calon kepala desa. Ada

pula yang bertugas menyiapkan visi dan misi beserta berbagai kelengkapan yang terkait dengan itu. Ada pula tim yang terkait dengan masalah-masalah *spiritual*. Artinya tim ini bertanggung jawab khusus untuk bidang gaib, termasuk menggunakan jasa paranormal kalau tidak layak disebut dukun.

Selain berbagai tim dengan spesialisasi masing-masing tersebut, terdapat orang dekat yang mengurus masalah dana. Karena persoalan dana ini termasuk sensitif dan rahasia, maka tidak sembarangan orang mampu menembus informasi ini. Digunakan orang tertentu dan dapat dipercaya. Dalam praktek politik uang, melalui tangan-tangan inilah uang disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Dari ketiga Calon Kepala Desa Masin, semuanya dikelilingi oleh tim sukses, dimana mereka bersaing untuk mencari dukungan suara kepada warga Desa Masin sebanyak-banyaknya.

2) Melalui Orang Terdekat

Tidak selamanya tim sukses yang berada di sekeliling bakal calon kepala desa mampu menembus sasaran yang hendak diberikan dana. Dalam praktek politik uang berbagai cara dilakukan. Latar belakang orang-orang yang dianggap berpengaruh dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kemudian dipelajari secara seksama. Misalnya, dicari informasi akurat tentang siapa keluarganya, dari mana ia berasal, kepada siapa ia berhubungan dekat, siapa saja yang mungkin mampu mempengaruhinya.

Apabila data yang diperlukan mampu didapat kemudian diputuskan siapa yang akan melakukan pendekatan. Misalnya orang tersebut sangat dekat seorang pengusaha desa itu. Jadi digunakan cara pendekatan melalui pengusaha tersebut, termasuk menyampaikan uang yang disepakati.

3) Pemberian Langsung Oleh Calon Kepala Desa

Tidak menutup kemungkinan sang bakal calon kepala desa mengadakan pendekatan langsung. Sangat mungkin bakal calon kepala desa terlibat langsung dalam penyampaian sejumlah dana untuk kepentingan pemilihan. Biasanya misi ini dilakukan secara rahasia oleh calon kepala desa. Operasi ini dapat dilakukan di pagi hari atau pada malam hari, tergantung kesepakatan atau dengan cara mendatangi rumah secara mendadak.

Memelihara calon pemilih yang sudah diperoleh dukungannya dan merebut calon pemilih pendukung calon kepala desa lawan dilakukan sampai menjelang hari pencoblosan. Pemeliharaan calon pemilih pendukung dan upaya pencegahan perebutan oleh kader calon kepala desa lawan dilakukan pada hari pencoblosan. Hal itu dilakukan dengan cara di jalan menuju ke TPS diberi aba-aba agar jangan lupa tanda gambar pilihannya.

Pelaksanaan kampanye oleh kelompok pemuda, tokoh masyarakat dalam mendukung calon kepala desa dukungannya diselenggarakan secara terorganisasi. Langkah langkah berikut ditempuh, yaitu :

- 1) Menyusun “peta” kampanye: Hal itu antara lain dilakukan dengan menetapkan dusun-dusun mana yang tergolong pendukung dan dusun-dusun lawan (musuh), mengidentifikasi tokoh aras dusun dan tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh terhadap massa/warga desa, dan mengidentifikasi dusun-dusun yang mana memerlukan perlakuan khusus dan dusun-dusun yang mana tidak memerlukan perlakuan khusus. Misalnya, di Dusun Masin Tengah itu basis massa dibagi dua yaitu pendukung Calon Kepala Desa Masrur dan Calon Kepala Desa Asmilin, karena kedua calon kepala desa tersebut berasal dari Dusun Masin Tengah. Tetapi, ada sebagian kecil dari Dusun Masin Tengah yang mendukung Calon Kepala Desa, Sugianto.
- 2) Mengidentifikasi anggota-anggota masyarakat di dusun yang mendukung, tidak mendukung, atau netral (ngambang), dan anggota-anggota masyarakat pendukung calon kepala desa lawan yang dapat ditarik/dialihkan menjadi pendukung calon kepala desa yang didukung.
- 3) Menarik pendukung calon kepala desa lawan: Hal itu antara lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Meminta secara ramah (kekeluargaan) dan baik-baik (tahap pertama); Kalau upaya tersebut tidak berhasil, maka tokoh masyarakat atau tokoh agama yang berpengaruh terhadap para pendukung calon kepala desa lawan diminta agar mempengaruhi pendukung calon kepala desa lawan itu; Kalau upaya lewat tokoh-tokoh itupun gagal, kepada pendukung calon kepala desa lawan itu diberi imbalan (uang atau lainnya); dan akhirnya walaupun pemberian imbalan gagal, diterapkan ancaman atau cara kekerasan. Contoh, dari salah satu warga Desa Masin yang mendapat ancaman (*intimidasi*) dari kedua kader calon kepala Desa Masin, Warga Desa Masin tersebut rumahnya berada di tengah diantara kedua kader calon kepala desa yang berbeda. Oleh karena itu, kedua kader calon kepala desa tersebut agar mendukung calon kepala desa yang satu, sementara kader yang lainnya juga melakukan hal yang serupa. Warga desa tersebut tetap memilih atau mendukung calon kepala desa yang masih ada hubungan saudara jauh, walaupun akhirnya yang terpilih menjadi Kepala Desa masin bukan hasil dukungannya.
- 4) Menetapkan dusun target (“pengambilan dusun target”): Yang dimaksudkan adalah menetapkan dusun-dusun yang menjadi “lokasi pijakan kemenangan” (yang harus dimenangkan) dan dusun-dusun yang ditinggalkan (yang pasti kalah), yaitu dusun-dusun tempat bermukimnya massa pendukung calon kepala desa lawan. Ini diterapkan demi mencapai efektifitas kampanye. Dusun-dusun yang diproyeksikan menang (“dusun target”) dipenuhi aspirasinya (misalnya: dengan merealisasikan pembangunan fisik di dusun pada masa kampanye ataupun realisasinya dilakukan sesudah menjadi kepala desa).
- 5) Merekrut tokoh-tokoh penting; Ini dilakukan jauh hari sebelum pencoblosan (tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat).
- 6) Membatasi ruang gerak pihak lawan: Untuk membatasi ruang gerak pihak lawan (kegiatan para kader calon kepala desa lawan) diterapkan cara-cara tertentu baik

cara yang menaati norma-norma yang berlaku ataupun pula cara-cara yang melanggar norma-norma demokrasi dan norma-norma sosial lainnya. Atau menciptakan rasa khawatir dalam masyarakat bahwa apabila calon kepala desa yang didukung

Dilihat dari segi budaya, persaingan dalam pemilihan kepala desa merupakan proses politik pedesaan, dimana calon kepala Desa Masin akan menggunakan berbagai cara untuk terpilih menjadi Kepala Desa Masin. Cara tersebut ada yang demokratis dan ada yang tidak demokratis. Seperti yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Masin ini, ada yang sifatnya irrasional dimana ada dari para kader Calon Kepala Desa Masin menggunakan kekuatan-kekuatan lain yang sifatnya supranatural. Hal tersebut, mengakibatkan konflik yang bersifat tertutup, dimana sampai saat ini kedua keluarga kader tersebut tidak bisa bersikap ramah dan akur walaupun mereka saling bertetangga. Ini membuktikan bahwa dalam pemilihan kepala desa itu kurang demokratis.

Ada indikasi tertentu dalam pemilihan kepala Desa Masin, salah satu kader calon kepala desa menggunakan kekuatan dukun untuk memenangkan dukungan dari seluruh warga Desa Masin. Hal ini juga dilakukan kepada kader calon kepala desa lain, sehingga semenjak adanya pemilihan kepala Desa Masin kader calon kepala desa tersebut menderita sakit sampai akhirnya meninggal. Menurut survei dari beberapa warga Desa Masin, peneliti mendapat informasi bahwa peristiwa itu terjadi karena adanya kekuatan-kekuatan supranatural yang dilaksanakan oleh salah satu kader calon kepala Desa Masin yang lain yang tidak menyukai dukungannya.

Pemilihan Kepala Desa Masin akhirnya dimenangkan oleh Sugianto, calon kepala desa yang berpendidikan sarjana, dimana dukungannya berasal dari sebagian besar kaum pemuda, sebagian tokoh ulama dan tokoh masyarakat. Perolehan suara yang didapat oleh Sugianto hampir sama dengan Masrur, mantan Kepala Desa Masin, yaitu 50 % jumlah suara untuk Sugianto dengan tanda gambar ketela dan 45 % untuk suara Masrur dengan tanda gambar padi. Sisanya 5 % untuk suara Asmilin dengan tanda gambar jagung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Hasil Pemilihan Kepala Desa Masin Kecamatan
Warungasem 29 Maret 1999

No	Bakal Calon Kepala Desa	Jumlah Suara (%)	Gambar (Kode)
1	Sugianto	50	Ketela
2	Masrur	45	Padi
3	Asmilin	5	Jagung

Sumber: Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa, Maret 1999

Dari pembahasan tentang strategi yang digunakan calon kepala desa dalam pemilihan Kepala Desa Masin ini dapat kita lihat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Strategi Yang Digunakan Calon Kepala Desa

Nama Calon	Strategi	Media Yang Dipakai	Pelaku	Hasil
Sugianto	Silaturahmi	Dengan secara langsung mendatangi tokoh masyarakat dan tokoh agama.	Calon Kepala Desa.	Pernyataan dukungan dan pemberian suara.
	<i>Money Politics</i>	Uang dan barang	Kader	Pemberian Suara
Masrur	<i>Istighosah</i> (Doa Bersama).	Pertemu-an	Calon Kades, kader dan masyarakat sekitar Kader	Pernyataan dukungan dan pemberian suara. Pemberian suara.
	<i>Money Politics.</i>	Uang dan Barang	Kader	Dapat mempengaruhi cara berpikir masyarakat.
	Penggunaan kekuatan ghoib. <i>Dudah ngamal</i>	Dukun	Kader, masyarakat dan aparat desa.	Pernyataan dukungan. Pernyataan dukungan dan pemberian suara.
	Silaturahmi	Pertemu-an Dengan secara langsung	Calon kepala desa sendiri	

		mendatangi tokoh masyarakat dan tokoh agama		
Asmilin	Silatu-rahmi	Dengan secara langsung mendatangi tokoh masyarakat dan tokoh agama	Calon Kades sendiri.	Pernyataan dukungan dan pemberian suara.
	<i>Money Politics</i>	Uang dan barang	Calon kades sendiri dan kader.	Pemberian suara
	<i>Tilik Sedulur</i>	Dengan secara langsung mendatangi rumah-rumah	Calon kades sendiri	Pernyataan dukungan dan pemberian suara.

Sumber : Hasil Penelitian, 2004

Dilihat dari budaya politik desa, strategi yang digunakan salah satu kader pendukung calon kepala Desa Masin dalam pemilihan kepala desa Masin ini masih menggunakan cara-cara tradisional dan masyarakat pun masih berpikir tradisional sehingga pemimpin atau calon kepala desa dianggap mempunyai kekuasaan sepenuhnya terhadap kemajuan desa dan masyarakatnya.

Mentalitas pemimpin desa memang masih sangat ditentukan oleh faktor struktur masyarakat yang berkembang di wilayah desa tertentu. Dari aspek sosiologis kepemimpinan sangat erat kaitannya dengan organisasi sosial yaitu struktur masyarakat. Struktur masyarakat bisa dalam konteks lingkup keluarga atau relasi kekerabatan sebagai basis masyarakat atau masyarakat itu sendiri sebagai satu himpunan atau asosiasi (*association*). Interaksi sosial yang dijalankan dalam sistem masyarakat Desa Masin awalnya bersifat ikatan persahabatan atau persaudaraan yang dikenal dengan “*sedulur*”

Akibatnya dari hasil pengamatan penulis, dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Masin adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan,

dimana mereka saling tolong menolong dan hormat menghormati antara sesama warga desa, tetapi masih ada yang membedakan antara yang miskin dan yang kaya.

Kepemimpinan di dalam masyarakat Desa Masin yang homogen, perlu disesuaikan dengan susunan masyarakat Desa Masin tersebut yang masih tegas-tegas memperlihatkan ciri-ciri paguyuban. Hubungan pribadi antara para pemimpin dengan yang dipimpin sangat dihagai. Hal ini disebabkan, pemimpin-pemimpin pada masyarakat tersebut adalah pemimpin yang mendapat dukungan dan sifat-sifat pribadinya yang menonjol, secara otomatis masyarakat lebih menaruh kepercayaan terhadap pemimpin-pemimpin tersebut, beserta peraturan-peraturan yang dikeluarkan.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, antara lain :

1. Hubungan antar aktor yang terlibat dalam pemilihan Kepala Desa Masin adalah hubungan kekerabatan, dimana dalam hubungan tersebut dipengaruhi oleh faktor pertemanan, persaudaraan dan ketetanggaan.
2. Dinamika pemilihan Kepala Desa Masin ditinjau dari konflik dan kompetisi yang berlangsung selama pemilihan Kepala Desa Masin adalah kurang demokratis, karena hal tersebut terjadi ada indikasi *money politics* dan adanya penggunaan kekuatan-kekuatan lain yang sifatnya supranatural.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Masyarakat Desa Masin
 - 1) Perlu diadakan kegiatan pemberdayaan dan pendidikan politik kepada masyarakat yang intensif, hal ini bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan oleh birokrasi publik, institusi politik, LSM dan lembaga sejenis dan perseorangan.
 - 2) Perlu adanya kesepakatan bersama (konsensus) antara masyarakat dan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus *money politics* dengan melaporkan kepada yang berwajib
 - 3) Perlu diadakan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan ikut menjadi panitia dalam pemilihan kepala desa
2. Untuk Pemerintah Desa Masin
 - 1) Perlu diadakan penerapan sanksi yang tegas terhadap orang-orang yang melanggar peraturan desa, seperti adanya kasus politik uang dengan hukuman pemecatan terhadap aparat desa dan pidana kurungan terhadap orang-orang yang melakukan kasus politik uang.

- 2) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diperlukan pengawasan oleh masyarakat yang lebih komprehensif dan independen dengan cara lebih terbuka atau bersifat transparansi agar pengalaman Orde Baru dalam proses pemilihan Kepala Desa tidak terulang lagi.
 - 3) Perlu diadakan sosialisasi terhadap peraturan pemilihan Kepala Desa agar pemahaman politik masyarakat meningkat.
3. Untuk Calon Kepala Desa
- 1) Agar memperoleh Calon Kepala Desa yang berkualitas diperlukan kampanye dialogis untuk mengetahui visi, misi dan program seorang kandidat.
 - 2) Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai kedudukan kepala desa sebagai kami tua desa, mengingat kepala desa relatif tidak bertindak sebagai “kami tua” (yang paling dituakan)

Daftar Pustaka

Buku:

Budiardjo, Miriam. 1982. *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: PT Gramedia

Dahl, Robert. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press, New Haven.

Ismawan, Indra. 1999. *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Pressindo

Kana. 2001. *Perubahan Di dalam Dinamika Politik Lokal Pedesaan*. Salatiga: Pustaka Percik

Kartodirdjo, Sartono. 1987. *Pesta Demokrasi di Pedesaan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah*

Kartohadikoesoemo, Sutardjo. 1953. *Desa*. Yogyakarta

K.Yin, Robert. 2000. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Latief, M Syahbudin. 2000. *Persaingan Calon Kepala Desa Di Jawa*. Yogyakarta: Media Pressindo

Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael, 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press

Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Percik. 1999. *Kerangka Dasar: Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik Lokal*

(P3PL). Yayasan Percik Salatiga.

Rifai, Amzulian. 2003. *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Schumpeter, Joseph A. 1947 *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Edisi kedua, Harper & Row New York.

Soehartono, Irawan. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Soekanto, Soerjono, 1999. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Suhartono, dkk. 2001. *Politik Lokal (Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama

Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

_____, 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Dokumen :

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 & Petunjuk Pelaksanaan. 2000. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Pedoman Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan. 1983. Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah: Prasetya Ulah Sakti Bhakti Praja.

Kabupaten Batang Dalam Angka 2003 Kerjasama Dengan Bappeda Kabupaten Dati II Batang Dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang

Data Monografi Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Juni 2000.

